

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 November 2022

Akhmad Sun'an
NIM: 161120126

ABSTRAK

Nama: Akhmad Sun'an, **NIM:** 161120126, **Judul Skripsi:** *Mekanisme Pembentukan dan Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan di desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan telah diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa tidak lagi diatur secara tegas dan eksplisit, di Pasal 8 UU tersebut hanya menyebutkan peraturan kepala desa atau yang setingkat. Padahal sebelumnya dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan desa ini masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dibawah peraturan daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa? 2) Bagaimana Kedudukan Peraturan Desa dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? dan 3) Bagaimana Dampak Setelah Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Peraturan Desa?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui mekanisme pembentukan Peraturan Desa, 2) Untuk mengetahui kedudukan Peraturan Desa dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan 3) Untuk Mengetahui Dampak Setelah Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Peraturan Desa.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan penelusuran hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Undang-undang (*statute Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Mekanisme dalam pembentukan peraturan desa mengacu pada ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Adapun tahapan-tahapan pembentukan Peraturan desa yaitu : tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap penetapan, tahap pengundangan, tahap penyebarluasan, tahap evaluasi dan tahapan klarifikasi, 2) Kedudukan peraturan desa dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak mengubah eksistensi serta urgensi dari peraturan desa, kedudukannya diatur ulang dalam koridor Pasal 8 UU No. 12 tahun 2011 yang kedudukannya sama dengan peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MK, BPK, KY, DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota, 3) Dampak setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Peraturan Desa tidak mengubah urgensi dari Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nota : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Akhmad Sun'an
NIM. 161120126

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di-
Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Akhmad Sun'an NIM 161120126, Judul Skripsi : **Mekanisme Pembentukan dan Kedudukan peraturan Desa dalam Sistem Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harap segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 10 November 2022

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 195911191991031003

Pembimbing II

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A
NIP. 198408022011011008

PERSETUJUAN

Mekanisme Pembentukan dan Kedudukan peraturan Desa dalam Sistem Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Oleh

Akhmad Sun'an
NIM : 161120126

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

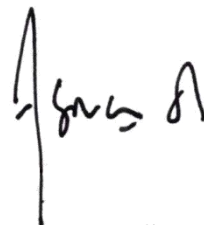
Mengetahui,

Dekan



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Akhmad Sun'an, NIM 161120126, berjudul : **Mekanisme Pembentukan dan Kedudukan peraturan Desa dalam Sistem Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal, 24 November 2022, Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 28 Desember 2022

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. M. Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota



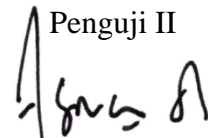
Arif Rahman, M.H.
NIP. 19870912 201903 1 009

Penguji I



Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP.19790326 200901 1 001

Penguji II



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas karunia dan kelancaran yang telah diberikan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis mempersembahkan skripsi ini khusus untuk orangtua tercinta, Bapak M. Khaerul Zaman dan Emak Siti Sanati dan juga segenap keluarga besar H. Achmad Basyuni (alm) dan keluarga besar Surtama (alm). serta teman-teman seperjuangan yang telah mendukung dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. semoga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa : 59)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Akhmad Sun'an, Lahir di Pandeglang, 12 Mei 1996 anak kedua dari pasangan Bapak M. Khaerul Zaman & Ibu Siti Sanati. Bertempat tinggal di Kp. Pasir Kacapi Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang.

Adapun jenjang pendidikan formal penulis yakni, MI Hubbul Wathan Minal Iman lulus pada tahun 2008, MTS At-Taqwa Yastu lulus pada tahun 2011, Madrasah Aliyah At-Taqwa Yastu lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis mengikuti organisasi internal maupun eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Banten Komisariat UIN SMH Banten, dan Keluarga Mahasiswa Pandeglang (KUMANDANG) Banten Komisariat UIN SMH Banten.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis selalu panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas rahmat dan hidayah-NYA yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini yang berjudul **Mekanisme Pembentukan dan Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Atu Karomah, SH., M.Si, Ketua Jurusan, Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, arahan serta bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu segala pelayanan administrasi selama perkuliahan terutama dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ust. Rifai dan bapak Wazin yang telah membantu dan mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Orang Tua Kandung saya yakni Bapak dan Emak yang telah sabar mendengarkan segala keluh kesah serta tak luput selalu memberikan suport kepada penulis.
8. Terimakasih saya ucapkan khusus kepada teman-teman kelas HTN-D 2016 seperjuangan yang telah menemani perjalanan perkuliahan selama ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar bisa berkumpul bersama lagi serta semoga kita selalu sukses dalam masing-masing bidang yang sedang dijalani. Serta organisasi saya Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Banten Komisariat UIN SMH Banten, Keluarga Mahasiswa Pandeglang (KUMANDANG) Banten Komisarian UIN SMH Banten yang telah membersamai selama saya di perkuliahan.
9. Teman seperjuangan saya di organisasi maupun di jurusan yang sama, Lutfi Alfian, Firdaus Teguh Laksana, Yosef Regita Firdaus, Uus Firdaus yang telah membantu dan memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan, kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan disebabkan oleh keterbatasan penulis dari segi pengetahuan, pengalaman maupun kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, kritik maupun saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dan semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah

keilmuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Serang, 10 November 2022

Akhmad Sun'an

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Fokus Penelitian | 9 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 9 |
| F. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 10 |
| G. Kerangka Pemikiran | 13 |
| H. Metodologi Penelitian | 25 |
| I. Sistematika Pembahasan | 29 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESA | |
| A. Pengertian Desa | 31 |
| B. Sejarah Pengaturan Desa | 37 |

| | |
|---|-----|
| C. Pemerintahan Desa | 43 |
| D. Peraturan Desa..... | 55 |
| BAB III PERATURAN DESA DALAM HIERARKI PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA | |
| A. Teori Peraturan Perundang-undangan | 60 |
| B. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | 66 |
| C. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia..... | 72 |
| 1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 | 73 |
| 2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 | 75 |
| D. Peraturan Desa dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan . | 78 |
| 1. Kedudukan Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 | 83 |
| 2. Kedudukan Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 | 86 |
| E. Pembentukan Peraturan Desa | 80 |
| BAB IV MEKANISME PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA | |
| A. Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa | 98 |
| B. Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hierarki Peraturan Perundang-undangan | 112 |

| | |
|---|-----|
| C. Dampak Setelah Berlakunya Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Peraturan Desa | 122 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 127 |
| B. Saran | 129 |
| DAFTAR PUSTAKA | |